

Pembahasan Undang-Undang no. 28/2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Amparos Pub. - Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan

Description: Analysis of Indonesian law on taxation.

-

Bertram, of Minden, ca. 1340-ca. 1415.

Dimensional analysis.

Working class -- Denmark -- Fåborg (Fyns amt) -- History -- 19th century.

Socialism -- Denmark -- Fåborg (Fyns amt) -- History -- 19th century.

Labor unions -- Denmark -- Fåborg (Fyns amt) -- History -- 19th century.

Education -- Philippines.

Interviewing in psychiatry.

Television broadcasting -- Australia.

Radio broadcasting -- Australia.

Cookery, American -- History -- 18th century.

Cookery, American.

Clans -- Fiction.

Samurai -- Fiction.

Taxation -- Law and legislation -- IndonesiaPembahasan Undang-Undang no. 28/2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

-Pembahasan Undang-Undang no. 28/2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Notes: Includes bibliographical references (p. 237).

This edition was published in 2007



Filesize: 36.210 MB

Tags: #Pengertian #Pajak

Makalah

Keterlambatan dalam pembayaran dan

penyetoran tersebut berakibat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. KUP : Pasal 3 ayat 1 3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.03/2015

Hal-hal yang Dapat Diajukan Keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas: a. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 1 Dalam hal pengajuan keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% lima puluh persen dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 9 Undang-Undang KUP. SPHP harus disampaikan kepada Wajib Pajak, baik secara langsung melalui kurir maupun dikirim melalui faksimili.

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Ayat 5a Ayat ini mengatur bahwa bagi Wajib Pajak yang mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding tertangguh sampai dengan 1 satu bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Ayat 5 Tanda penerimaan surat yang telah diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau oleh pos berfungsi sebagai tanda terima surat keberatan apabila surat tersebut memenuhi syarat sebagai surat keberatan.

Resume KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

Tim Quality Assurance Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan guna menghasilkan Pemeriksaan yang berkualitas, hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa

Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 huruf a; dan mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 huruf a; dan Apabila Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a paling lama 6 enam bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. Ketentuan umum tata cara perpajakan, Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat diandalkan, untuk itu berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan melibatkan bendahara. Pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali kepada MA berdasar Pasal 27 ayat 3 UU Pengadilan Pajak.

Related Books

- [Rừng sâu - tập truyện](#)
- [Zhongguo dui wai mao yi shi jian lun](#)
- [Estimation when the sampling ratio is a linear function of the dependent variable](#)
- [State - critical concepts](#)
- [Atlases in libraries of Chicago - a bibliography and union check list](#)